

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera adalah satu dari empat program yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo. Pelaksanaan program tersebut dilakukan berdasarkan pedoman dan panduan dokumen yang telah ditetapkan, yaitu melalui petunjuk pelaksanaan, undang-undang, serta modul yang masing-masing membahas kegiatan dalam program tersebut. Jadi, penilaian implementasi didasarkan pada pedoman pada setiap kegiatan. Capaian implementasi program akan sangat bergantung pada pelaksana dan penerima program. Pada kegiatan BKB, BKL, PIK-R telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Kegiatan lainnya, yaitu BKR dan UPPKA ditemui beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Pada kegiatan BKR dana anggaran yang seharusnya didapat dari dana desa, tetapi dana tersebut tidak kunjung cair sehingga menggunakan dana pribadi kader untuk melaksanakan kegiatan posyandu remaja. Selanjutnya kegiatan UPPKA tidak memberikan pengarahan materi seputar menggalang sumber permodalan dan membentuk jaringan pemasaran sehingga penyerapan materi penerima program tidak berjalan secara utuh. Permasalahan tersebut mempengaruhi kinerja pelaksana kegiatan dan respon dari penerima program. Hasilnya dapat berimbas pada tujuan program untuk memberikan kesejahteraan pada keluarga di Ponorogo tidak dapat dicapai secara maksimal.

4.1.2 Faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Data keaktifan kelompok kegiatan menunjukkan banyak kelompok yang tidak aktif dan berkurang jumlahnya. Peneliti menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui hambatan pelaksanaan program. Penyebab ketidakaktifan kelompok kegiatan yang ada di antaranya:

1. Sumber daya manusia yang terbatas secara kuantitas. Meskipun dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki PLKB di kecamatan dan kader desa, tetapi internal dinas tersebut memiliki kekurangan jumlah sumber daya manusia. Saat dihadapkan dengan target kegiatan yang banyak jumlahnya, para pelaksana program merasa kewalahan dalam memenuhinya karena sumber daya manusia yang terbatas tidak sebanding dengan target yang besar dan jangkauan wilayah yang luas.
2. Sumber daya finansial program ini dari setiap kegiatannya sangat minim dan proses pencairannya membutuhkan waktu sehingga menjadi permasalahan pada kelancaran seluruh kegiatan. terlebih pada kegiatan BKR yang masih menggunakan dana pribadi kader desa untuk pelaksanaannya selama dua kali pertemuan.
3. Kompetensi pelaksana program hanya dipilih berdasarkan subjektivitas pemimpin sehingga banyak kompetensi dan tanggung jawab kader desa yang kurang optimal. Permasalahan ini juga mempengaruhi sikap dan tanggapan pelaksana program yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan program.
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana menunjukkan beberapa tanggapan yang kurang baik mulai dari adanya kesibukan yang membuat kegiatan tertunda dan

tidak terlaksana, serta perbedaan sifat dan kepribadian yang membuat tanggung jawab seseorang melemah.

5. Partisipasi masyarakat menimbulkan respon yang beragam di antaranya terdapat masyarakat yang memiliki antusias tinggi dan ada yang rendah. Respon yang paling menjadi hambatan adalah remaja yang kurang memiliki antusias tinggi sehingga keaktifannya terganggu.

Dapat ditarik garis besar dari paparan sebelumnya bahwa hambatan program terletak pada sumber daya baik manusia maupun finansial yang kurang terpenuhi, pelaksana program yang kurang berkualitas, dan penerima program yang tidak memberi respon dengan baik. Ketiga poin penghambat tersebut merupakan komponen penting dalam kelancaran implementasi program yang saling mempengaruhi. Sumber daya menggambarkan dukungan program, pelaksana program menggambarkan subjek pelaksana, dan penerima program menggambarkan objek sasaran program. Hambatan yang terjadi pada setiap kegiatan menandakan bahwa kebutuhan program belum terpenuhi secara utuh sehingga hasil laporan kegiatan tidak terpenuhi sesuai dengan regulasi.

4.2 Rekomendasi

1. Sumber daya manusia yang minim dapat dibantu dengan melakukan kerja sama dengan beberapa pihak lain yang berpotensi untuk menjadi akselelator program. Selain itu, inovasi modernisasi dapat dilakukan mengikuti perkembangan zaman sesuai sasaran yang dibutuhkan, misalnya promosi kegiatan melalui sosial media yang lebih diminati oleh remaja sehingga lebih banyak remaja yang tertarik mengikuti kegiatan dan pelaksana program dapat melakukan penyuluhan secara online untuk memudahkan pencapaian target pelaksana program.

2. Pemerintah desa perlu mengevaluasi dana desa yang dialokasikan pada setiap kegiatan yang ada di desa sehingga memiliki catatan yang penting dalam menyusun penggunaan anggaran kedepannya.
3. Pemilihan kader desa yang cenderung bersifat subjektif perlu memiliki standar untuk memilih kader yang lebih berkompeten di bidangnya.
4. Sikap dan tanggapan pelaksana yang tidak bertanggung jawab perlu dihindari dengan pemilihan yang lebih selektif, misalnya dengan memberikan kualifikasi kepada kader yang akan dipilih.
5. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan melakukan promosi secara online melalui media sosial dan bekerja sama dengan komunitas genre untuk membuat konten interaktif agar minat masyarakat semakin bertumbuh.